



Hubungan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila dengan Sikap Etis Mahasiswa terhadap Konten Deepfake di Media Sosial

Doni Saputra¹, Tika Sofiyani², Dheny Wiratmoko³

^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Teknik Informatika,
Universitas Negeri Yogyakarta,
Indonesia

*donisaputra.2024@student.uny.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 29th April 2026

Revised: 10th May 2026

Accepted: 5th June 2026

Keywords:

Pancasila; Deep
Fake; Digital Ethics;
Civic Education;
Digital Citizenship

ABSTRACT

The proliferation of deepfakes has expanded digital problems from misinformation to issues of authenticity, identity manipulation, and declining trust in media content. In this context, students' responses to deepfakes are shaped not only by their understanding of synthetic media, but also by the ethical framework they use to judge, verify, and respond to content. This study examined the relationship between understanding Pancasila values and students' ethical attitudes toward deepfake content on social media. The study used an exploratory correlational quantitative design with a cross-sectional survey. Data were obtained from 50 complete student responses collected online on 6-10 April 2026 using a 1-5 Likert scale questionnaire comprising 28 items across four constructs: understanding of deepfakes, understanding of Pancasila values, information verification behavior, and ethical attitudes toward deepfakes. Analysis included descriptive statistics, corrected item-total correlation, Cronbach's alpha, Pearson and Spearman correlations, and simple linear regression used to describe linear association. The results showed that all variables were in the very high category; the highest mean was ethical attitudes toward deepfakes ($M = 4.498$; $SD = 0.201$), followed by understanding of Pancasila values ($M = 4.412$; $SD = 0.299$). Understanding of Pancasila values was positively and significantly related to ethical attitudes toward deepfakes ($r = 0.573$; $p < 0.001$; $\rho = 0.641$; $p < 0.001$). In the simple linear model, the coefficient remained positive ($B = 0.386$; $R^2 = 0.329$; $p < 0.001$; $HC3 \text{ sig.} = 0.018$). These findings indicate an initial positive association between understanding Pancasila values and students' ethical dispositions toward deepfakes, although the results should be interpreted cautiously because the self-report instrument was still exploratory.



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2026 by the author(s).

Corresponding Author:

Doni Saputra

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika,
Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
donisaputra.2024@student.uny.ac.id

PENDAHULUAN

Deepfake merupakan media sintetis yang dimanipulasi dengan teknik pembelajaran mendalam sehingga mampu meniru wajah, suara atau tindakan seseorang secara meyakinkan (Altuncu et al., 2024; Lundberg & Mozelius, 2025). Kemudahan akses terhadap alat generatif telah membuat produksi *deepfake* tidak lagi terbatas pada pelaku teknis tingkat lanjut. Akibatnya, ruang digital menghadapi persoalan baru berupa kaburnya batas antara konten autentik dan konten rekayasa, terutama ketika materi yang beredar tampil sangat realistis dan mudah dipercaya.

Persoalan *deepfake* tidak berhenti pada aspek teknologinya. Diel et al. (2025) memetakan dampak negatif *deepfake* pada kekhawatiran publik, konsekuensi penipuan, gangguan kesehatan mental, dan menurunnya kepercayaan terhadap media. Alanazi et al. (2025), Boediman (2025), Nagara (2025), dan Ahmed (2023) juga menunjukkan bahwa *deepfake* berkaitan dengan ancaman terhadap privasi, integritas informasi, skeptisisme berita, dan kualitas ruang publik digital. Dengan demikian, respons terhadap *deepfake* tidak cukup dipahami sebagai soal deteksi teknis, tetapi juga sebagai soal pertimbangan etik ketika seseorang menilai, memverifikasi, dan merespons konten.

Dalam perspektif *civic education*, situasi ini berhubungan dengan pembentukan kewargaan digital yang bertanggung jawab. Mahasiswa tidak hanya dituntut mampu mengenali informasi bermasalah, tetapi juga menunjukkan disposisi kewargaan berupa kehati-hatian verifikasi, penghormatan terhadap martabat orang lain, dan tanggung jawab sosial ketika berinteraksi di media sosial. Li (2024) menunjukkan bahwa sikap dan kendali perilaku berhubungan dengan niat individu untuk menonton atau membagikan *deepfake*. Di sisi lain, Dhahir et al. (2024) serta St-Onge et al. (2024) memperlihatkan bahwa literasi digital dan kemampuan klasifikasi tidak selalu cukup untuk menjelaskan respons individu terhadap *deepfake*. Artinya, persoalan *deepfake* perlu dikaji sebagai isu teknis sekaligus isu etis-kewargaan.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan menyediakan dasar normatif untuk menilai apakah praktik digital sejalan dengan kejujuran, penghormatan terhadap martabat manusia, persatuan sosial, kebijaksanaan dalam menilai informasi, dan keadilan bagi pihak yang terdampak (Anggraini, 2025). Penguatan nilai-nilai tersebut di kalangan mahasiswa berlangsung di tengah budaya digital yang cepat, reaktif, dan sarat konten viral. Rejekiingsih et al. (2025) dan Nurfaulziyanti et al. (2022) menegaskan pentingnya etika digital dan literasi digital dalam pembentukan sikap sosial-kewargaan mahasiswa. Sehingga Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan perlu hadir bukan hanya sebagai materi normatif, tetapi juga sebagai rujukan etik dalam menghadapi manipulasi media digital.

Penegasan mengenai subjek penelitian menjadi penting pada titik ini. Mahasiswa merupakan kelompok *digital native* yang tumbuh dan beraktivitas dalam ekosistem media digital sejak usia dini, sehingga pola konsumsi, produksi, dan respons mereka terhadap konten daring cenderung berbeda dari kelompok usia lain. Secara khusus, mahasiswa kependidikan dan teknik menempati posisi strategis karena akan berperan ganda di masa depan, yaitu sebagai pendidik yang membentuk literasi digital generasi berikutnya maupun sebagai pengembang teknologi yang turut menentukan arah pemanfaatan media sintetis di masyarakat. Posisi ganda ini menjadikan orientasi etik mereka terhadap *deepfake* bukan sekadar persoalan individual, melainkan juga persoalan yang berpotensi menular kepada pihak lain melalui peran profesional yang akan mereka jalani sebagai agen perubahan sosial di bidang pendidikan maupun teknologi.

Selain posisi strategisnya, mahasiswa juga menunjukkan intensitas yang tinggi dalam penggunaan media sosial, sehingga kelompok ini secara bersamaan rentan terpapar konten *deepfake*. Pemilihan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta sebagai konteks penelitian relevan

karena UNY merupakan institusi pendidikan yang secara khusus mencetak calon pendidik dan tenaga kependidikan teknik, sehingga temuan mengenai keterkaitan pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan sikap etis terhadap *deepfake* pada kelompok ini memiliki implikasi langsung bagi penguatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital di lingkungan kampus berbasis kependidikan.

Walaupun penelitian tentang *deepfake* berkembang pesat, belum banyak bukti empiris yang secara spesifik menguji hubungan pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan sikap etis mahasiswa terhadap konten *deepfake* di media sosial. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan sikap etis mahasiswa terhadap konten *deepfake* di media sosial. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya menempatkan isu *deepfake* ke dalam perbincangan *civic education*, khususnya Pendidikan Pancasila, kewargaan digital, dan pembentukan disposisi etik mahasiswa di ruang digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan rancangan survei potong lintang. Penelitian dinyatakan bersifat eksploratif karena instrumen yang digunakan merupakan instrumen mandiri berbasis *self-report* dan kualitas psikometriknya belum seluruhnya memadai.

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Yogyakarta yang menggunakan media sosial dan pernah terpapar konten digital di platform daring. Teknik sampling yang digunakan adalah *convenience sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kemudahan akses dan kesediaan mereka untuk mengisi kuesioner secara daring. Responden direkrut secara daring melalui penyebaran tautan kuesioner menggunakan media komunikasi digital, seperti WhatsApp, Telegram, atau Google Classroom. Pada bagian awal kuesioner, responden terlebih dahulu memperoleh informasi singkat mengenai tujuan penelitian, sifat sukarela partisipasi, kerahasiaan data, dan estimasi waktu pengisian. Berdasarkan stempel waktu pada lembar jawaban, pengisian berlangsung pada 6-10 April 2026. Kuesioner didistribusikan kepada 65 calon responden, dan sebanyak 50 respons lengkap diperoleh serta dianalisis. Dengan demikian, response rate penelitian ini adalah 76,92%. Hanya respons yang terisi lengkap yang dimasukkan ke dalam analisis.

Penelitian ini secara eksplisit diposisikan sebagai studi eksploratif sehingga jumlah 50 responden tetap dapat dipertimbangkan layak untuk dianalisis menggunakan korelasi Pearson dan regresi linear sederhana. Beberapa pedoman metodologis dalam penelitian eksploratif menyebutkan bahwa analisis regresi linear sederhana dengan satu prediktor masih dapat dilakukan pada ukuran sampel di atas 30-50 responden, terutama apabila tujuan utamanya adalah mendeteksi indikasi awal hubungan antarvariabel dan bukan untuk menghasilkan estimasi parameter populasi yang presisi. Dengan jumlah 50 responden, penelitian ini memiliki daya statistik yang cukup untuk mendeteksi hubungan dengan kekuatan efek sedang hingga besar, sebagaimana tercermin pada koefisien korelasi dan regresi yang signifikan pada taraf $p < 0,001$. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada populasi mahasiswa yang lebih luas, melainkan untuk memberikan gambaran awal yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan penelitian lanjutan dengan ukuran sampel yang lebih besar dan instrumen yang lebih teruji.

Penggunaan teknik *convenience sampling* dalam penelitian ini perlu dibaca beserta keterbatasannya. Teknik ini berpotensi menimbulkan bias representativitas karena responden yang terjaring sangat bergantung pada jaringan komunikasi digital peneliti dan kesediaan individu untuk berpartisipasi, sehingga karakteristik responden belum tentu mencerminkan seluruh populasi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta secara proporsional. Konsekuensinya, generalisasi temuan ke luar sampel penelitian ini perlu dilakukan secara hati-hati, dan hasil yang diperoleh lebih tepat dibaca sebagai gambaran pada kelompok responden yang terjangkau dibandingkan sebagai representasi populasi secara keseluruhan. Pemilihan teknik ini pada tahap awal didasarkan pada pertimbangan praktis, yaitu efisiensi waktu dan keterbatasan akses pada studi eksploratif yang bertujuan menjajaki pola hubungan antarvariabel sebelum dilakukan penelitian dengan desain sampling yang lebih ketat, seperti *stratified random sampling* pada populasi mahasiswa yang lebih luas.

Sebelum mengisi kuesioner, responden terlebih dahulu diberikan lembar persetujuan partisipasi (*informed consent*) pada halaman awal formulir. Lembar tersebut memuat informasi mengenai tujuan penelitian, sifat sukarela partisipasi, hak responden untuk menghentikan pengisian kapan saja, serta jaminan bahwa data digunakan hanya untuk kepentingan akademik. Responden yang melanjutkan pengisian kuesioner diperlakukan sebagai pihak yang telah memberikan persetujuan berpartisipasi. Penelitian ini tidak mengumpulkan identitas pribadi yang dapat secara langsung mengungkap jati diri responden. Data dianalisis secara agregat untuk menjaga kerahasiaan partisipan.

Instrumen penelitian terdiri atas 28 butir dengan skala Linier 1-5, yaitu 1 = sangat tidak setuju sampai 5 = sangat setuju. Instrumen memuat empat konstruk, yaitu (1) pemahaman tentang deepfake (5 butir), (2) pemahaman nilai-nilai Pancasila (10 butir), (3) perilaku verifikasi informasi (5 butir), dan (4) sikap etis terhadap konten *deepfake* (8 butir). Dalam revisi ini, istilah “pemahaman nilai-nilai Pancasila” dipertahankan agar konsisten dengan operasional variabel pada instrumen penelitian. Seluruh item disusun searah (*favorable*), sehingga potensi *acquiescence* bias perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil.

Skor tiap konstruk dihitung sebagai rerata butir agar tetap berada pada rentang 1-5. Kategori interpretasi yang digunakan adalah 1,00-1,80 = sangat rendah; 1,81-2,60 = rendah; 2,61-3,40 = sedang; 3,41-4,20 = tinggi; dan 4,21-5,00 = sangat tinggi. Analisis data meliputi statistik deskriptif, *corrected item-total correlation*, Cronbach’s alpha, korelasi Pearson, korelasi Spearman sebagai uji ketahanan, dan regresi linear sederhana. Dalam penelitian ini, hasil regresi tidak ditafsirkan sebagai bukti kausalitas, melainkan sebagai gambaran asosiasi linear pada data potong lintang. Karena uji Breusch-Pagan pada model sederhana menunjukkan gejala heteroskedastisitas ($p = 0,003$), signifikansi koefisien juga diperiksa dengan kovarians robust HC3.

Penelitian ini merupakan survei daring nonintervensi dengan risiko minimal. Pelaksanaannya menekankan prinsip partisipasi sukarela, *informed consent*, anonimitas, dan kerahasiaan data. Informasi mengenai persetujuan etik formal disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di institusi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara demografis, responden didominasi perempuan (70,0%) dengan usia rata-rata 21,08 tahun ($SD = 1,23$; rentang 18-23 tahun). Semester yang paling banyak terwakili adalah semester 6 (34,0%), disusul semester 8 (28,0%) dan semester 4 (26,0%). Intensitas penggunaan media sosial relatif tinggi; 84,0% responden melaporkan penggunaan lebih dari tiga jam per hari. Seluruh responden menyatakan pernah melihat konten *deepfake*. Pada pertanyaan multirespons, platform yang paling sering disebut sebagai sumber paparan *deepfake* adalah Instagram (76,0%) dan TikTok (72,0%), diikuti Twitter/X (32,0%), WhatsApp (22,0%), dan YouTube (20,0%). Secara substantif, profil ini menunjukkan bahwa analisis hubungan pada penelitian tidak dilakukan pada kelompok yang asing terhadap fenomena *deepfake*, melainkan pada mahasiswa yang berada dalam ekosistem media sosial dengan intensitas paparan tinggi dan pengalaman kontak yang nyata dengan konten sintetis. Dominasi Instagram dan TikTok juga penting dicatat karena kedua platform tersebut bekerja melalui logika visual, kecepatan sirkulasi, dan viralitas yang tinggi, sehingga persoalan etika terhadap *deepfake* menjadi sangat relevan dalam praktik keseharian bermedia, bukan sekadar isu hipotetis.

Aspek	Kategori	f	%
Jenis kelamin	Perempuan	35	70,0
Jenis kelamin	Laki-laki	15	30,0
Semester	Semester 2	6	12,0
Semester	Semester 4	13	26,0
Semester	Semester 6	17	34,0
Semester	Semester 8	14	28,0
Intensitas penggunaan media sosial	> 5 jam	22	44,0
Intensitas penggunaan media sosial	3-5 jam	20	40,0
Intensitas penggunaan media sosial	1-3 jam	6	12,0
Intensitas penggunaan media sosial	< 1 jam	2	4,0
Pernah melihat deepfake	Ya	50	100,0
Platform temuan deepfake	Instagram	38	76,0
Platform temuan deepfake	TikTok	36	72,0
Platform temuan deepfake	Twitter/X	16	32,0
Platform temuan deepfake	WhatsApp	11	22,0
Platform temuan deepfake	YouTube	10	20,0

Tabel 1. Profil responden

Ringkasan kualitas instrumen menunjukkan *corrected item-total correlation* yang heterogen dan koefisien alpha yang belum seluruhnya memadai. Konstruk pemahaman nilai-nilai

Pancasila ($\alpha = 0,534$) dan perilaku verifikasi informasi ($\alpha = 0,505$) masih dapat dibaca sebagai indeks eksploratif yang cukup, sedangkan pemahaman tentang *deepfake* ($\alpha = 0,206$) menunjukkan reliabilitas rendah. Konstruk sikap etis terhadap konten *deepfake* memiliki konsistensi internal yang tidak memadai ($\alpha = -0,120$) bila diperlakukan sebagai skala reflektif tunggal. Secara akademik, temuan ini mengisyaratkan bahwa keterhubungan antarbutir pada beberapa konstruk belum sepenuhnya stabil, sehingga skor komposit lebih tepat diposisikan sebagai indikator awal untuk membaca kecenderungan umum, bukan sebagai ukuran final yang telah mapan secara psikometrik. Pada konstruk pemahaman nilai-nilai Pancasila dan perilaku verifikasi informasi, α yang berada pada tingkat eksploratif masih memungkinkan pembacaan pola secara hati-hati. Sebaliknya, reliabilitas yang rendah pada konstruk pemahaman tentang *deepfake* dan terutama α negatif pada sikap etis mengindikasikan bahwa butir-butir dalam konstruk tersebut belum bergerak secara konsisten sebagai satu dimensi reflektif tunggal. Oleh sebab itu, hasil inferensial pada penelitian ini perlu dibaca secara hati-hati sebagai indikasi awal yang berguna untuk eksplorasi, tetapi belum cukup kuat untuk ditafsirkan sebagai bukti yang final.

Konstruk	Jumlah item	rit min	rit maks	Alpha	Keterangan
Pemahaman deepfake	5	-0,167	0,360	0,206	rendah
Pemahaman nilai-nilai Pancasila	10	0,016	0,443	0,534	eksploratif/cukup
Perilaku verifikasi informasi	5	0,025	0,439	0,505	eksploratif/cukup
Sikap etis atas deepfake	8	-0,327	0,190	-0,120	tidak memadai; indikasi indeks multidimensi

Tabel 2. Ringkasan eksploratif kualitas instrumen

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel berada pada kategori sangat tinggi. Rerata tertinggi terdapat pada sikap etis terhadap konten *deepfake* ($M = 4,498$; $SD = 0,201$), diikuti pemahaman nilai-nilai Pancasila ($M = 4,412$; $SD = 0,299$), pemahaman tentang *deepfake* ($M = 4,400$; $SD = 0,313$), dan perilaku verifikasi informasi ($M = 4,344$; $SD = 0,459$). Pada dimensi pemahaman nilai-nilai Pancasila, aspek persatuan/koheisi sosial ($M = 4,500$) dan ketuhanan/kejujuran digital ($M = 4,490$) muncul sebagai dimensi paling tinggi, sedangkan aspek kerakyatan/verifikasi rasional ($M = 4,290$) dan keadilan sosial/keadilan digital ($M = 4,330$) relatif lebih rendah, meskipun tetap berada pada kategori sangat tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa pada tingkat *self-report*, responden cenderung menampilkan orientasi normatif yang sangat positif baik pada ranah pemahaman maupun sikap. Akan tetapi, sebaran skor yang relatif sempit, khususnya pada sikap etis terhadap *deepfake*, juga mengindikasikan bahwa variasi antarresponden tidak terlalu lebar. Hal ini penting karena skor yang sangat tinggi tidak hanya dapat dibaca sebagai sinyal kuatnya orientasi etis, tetapi juga dapat menandakan terbatasnya daya beda instrumen dalam membedakan responden yang benar-benar sangat tinggi dengan yang sekadar cenderung menyetujui pernyataan normatif. Dengan demikian, hasil deskriptif perlu dibaca secara ganda: di satu sisi memperlihatkan adanya basis nilai dan sikap yang positif pada sampel, tetapi di sisi lain

tetap membuka kemungkinan adanya *ceiling effect* yang perlu dipertimbangkan dalam penafsiran berikutnya.

Variabel	Mean	SD	Kategori
Pemahaman deepfake	4,400	0,313	Sangat tinggi
Pemahaman nilai-nilai Pancasila	4,412	0,299	Sangat tinggi
Perilaku verifikasi informasi	4,344	0,459	Sangat tinggi
Sikap etis terhadap konten deepfake	4,498	0,201	Sangat tinggi

Tabel 3. Statistik deskriptif variabel utama

Dimensi internalisasi Pancasila	Mean	SD	Kategori
Ketuhanan / kejujuran digital	4,490	0,490	Sangat tinggi
Kemanusiaan / penghormatan martabat	4,450	0,508	Sangat tinggi
Persatuan / kohesi sosial	4,500	0,391	Sangat tinggi
Kerakyatan / verifikasi rasional	4,290	0,506	Sangat tinggi
Keadilan sosial / keadilan digital	4,330	0,577	Sangat tinggi

Tabel 4. Dimensi pemahaman nilai- nilai Pancasila dalam konteks digital

Apabila dicermati lebih jauh, profil dimensi pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa aspek persatuan/kohesi sosial dan ketuhanan/kejujuran digital menempati rerata paling tinggi. Hal ini memberi isyarat bahwa dalam konteks *deepfake*, responden cenderung menilai persoalan ini sebagai masalah kejujuran dan dampaknya terhadap relasi sosial. Sementara itu, aspek kerakyatan/verifikasi rasional dan keadilan sosial/keadilan digital yang relatif lebih rendah, meskipun tetap sangat tinggi, menunjukkan bahwa dimensi yang berkaitan dengan penalaran verifikatif dan pertimbangan keadilan masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Nuansa ini penting karena etika terhadap *deepfake* tidak hanya menuntut persetujuan terhadap nilai-nilai umum, tetapi juga menuntut kemampuan menerjemahkan nilai tersebut ke dalam pertimbangan yang rasional, adil, dan operasional ketika menghadapi konten yang belum jelas status kebenarannya.

Uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila berhubungan positif dan signifikan dengan sikap etis terhadap konten deepfake ($r = 0,573$; $p < 0,001$). Hubungan ini tetap muncul pada korelasi Spearman ($\rho = 0,641$; $p < 0,001$), sehingga pola temuan cukup stabil terhadap asumsi nonnormalitas skor komposit. Sebagai konteks, pemahaman tentang deepfake ($r = 0,535$; $p < 0,001$) dan perilaku verifikasi informasi ($r = 0,308$; $p = 0,030$) juga

berkorelasi positif dengan sikap etis. Secara substantif, hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman responden terhadap nilai-nilai Pancasila, semakin tinggi pula kecenderungan mereka melaporkan sikap yang lebih etis terhadap konten *deepfake* pada sampel penelitian ini.

Konsistensi antara Pearson dan Spearman memperkuat pembacaan bahwa arah hubungan tersebut tidak muncul semata-mata karena pilihan teknik analisis tertentu. Dalam konteks variabel lain, korelasi positif pemahaman tentang *deepfake* dan perilaku verifikasi informasi dengan sikap etis menegaskan bahwa respons etik terhadap *deepfake* tidak berdiri di atas satu landasan saja, melainkan berhubungan dengan kombinasi aspek normatif, kognitif, dan kebiasaan verifikasi. Menariknya, hubungan antara pemahaman nilai-nilai Pancasila dan perilaku verifikasi informasi berada pada taraf yang lebih lemah dan tidak mencapai signifikansi konvensional ($r = 0,276$; $p = 0,052$), sehingga pemahaman normatif yang tinggi pada sampel ini tidak otomatis identik dengan rutinitas verifikasi yang sama kuatnya. Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa orientasi nilai dan praktik verifikasi, meskipun saling berkaitan secara konseptual, tetap dapat bergerak dengan intensitas yang berbeda dalam pengalaman digital mahasiswa.

Pasangan variabel	r	p
Pemahaman tentang <i>deepfake</i> ↔ Pemahaman nilai-nilai Pancasila	0,380	0,007
Pemahaman tentang <i>deepfake</i> ↔ Perilaku verifikasi informasi	0,455	0,001
Pemahaman nilai-nilai Pancasila ↔ Perilaku verifikasi informasi	0,276	0,052
Pemahaman tentang <i>deepfake</i> ↔ Sikap etis terhadap konten <i>deepfake</i>	0,535	<0,001
Pemahaman nilai-nilai Pancasila ↔ Sikap etis terhadap konten <i>deepfake</i>	0,573	<0,001
Perilaku verifikasi informasi ↔ Sikap etis terhadap konten <i>deepfake</i>	0,308	0,030

Tabel 5. Korelasi Pearson antarvariabel utama

Pada model linear sederhana, koefisien antara pemahaman nilai-nilai Pancasila dan sikap etis terhadap konten *deepfake* tetap positif ($B = 0,386$; $\beta = 0,573$; $t = 4,849$; $p < 0,001$). Nilai $R^2 = 0,329$ menunjukkan bahwa 32,9% variasi skor sikap etis pada sampel ini berada dalam jangkauan model linear sederhana. Setelah dikoreksi dengan HC3, koefisien tetap signifikan ($p = 0,018$). Namun, mengingat desain penelitian bersifat potong lintang dan kualitas instrumen belum sepenuhnya memadai, model ini ditafsirkan sebagai gambaran asosiasi linear eksploratif, bukan bukti pengaruh kausal. Secara akademik, koefisien $B = 0,386$ dapat dibaca bahwa setiap kenaikan satu unit skor pemahaman nilai-nilai Pancasila berasosiasi dengan kenaikan 0,386 pada skor sikap etis dalam kerangka model linear sederhana pada sampel ini. Nilai R^2 yang mencapai 0,329 memperlihatkan bahwa hubungan tersebut cukup bermakna untuk dicermati, tetapi sekaligus menegaskan bahwa sebagian besar variasi sikap etis, yakni 67,1%, masih berada di luar model dan sangat mungkin berkaitan dengan faktor-faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Temuan uji Breusch-Pagan ($p = 0,003$) juga penting karena menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas, sehingga penggunaan kovarians robust HC3 menjadi langkah metodologis yang relevan untuk menjaga kehati-hatian inferensial. Fakta bahwa signifikansi koefisien tetap bertahan setelah koreksi HC3 memperkuat bahwa asosiasi positif yang ditemukan tidak

sepenuhnya bergantung pada asumsi galat homogen, namun tetap tidak mengubah status penelitian ini sebagai studi korelasional eksploratif yang tidak dapat dijadikan dasar penarikan kesimpulan kausal.

Komponen	Nilai
Konstanta	2,793
Koefisien regresi (B)	0,386
Beta	0,573
t	4,849
p	< 0,001
R	0,573
R ²	0,329
F hitung	23,515
Breusch-Pagan p	0,003
Sig. HC3 koefisien B	0,018

Tabel 6. Ringkasan regresi linear sederhana

PEMBAHASAN

Temuan bahwa seluruh responden pernah melihat *deepfake*, dengan paparan tinggi terutama melalui Instagram dan TikTok, menunjukkan bahwa *deepfake* telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Hal ini sejalan dengan Lundberg dan Mozeliuss (2025), Alanazi et al. (2025), dan Nagara (2025) yang menempatkan media sosial sebagai ruang utama persebaran konten sintesis. Dalam konteks *civic education*, situasi ini penting karena mahasiswa tidak hanya berhadapan dengan persoalan teknis mengenali konten manipulatif, tetapi juga dengan tuntutan etis untuk menilai informasi secara bertanggung jawab sebelum menyukai, mempercayai, atau menyebarkannya. Dengan kata lain, titik berangkat penelitian ini relevan dengan realitas keseharian responden: *deepfake* hadir bukan sebagai ancaman yang jauh, melainkan sebagai bagian dari arus informasi yang mereka hadapi dalam ruang digital yang cepat, visual, dan mudah memicu respons spontan.

Hubungan positif antara pemahaman nilai-nilai Pancasila dan sikap etis terhadap *deepfake* menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dibaca sebagai salah satu rujukan normatif dalam membentuk orientasi etik mahasiswa di ruang digital. Pemahaman atas kejujuran, penghormatan martabat manusia, persatuan sosial, kebijaksanaan dalam menilai informasi, dan keadilan digital tampak berkaitan dengan kecenderungan mahasiswa untuk menolak penyebaran konten yang merugikan orang lain, mengutamakan klarifikasi, dan menjaga tanggung jawab sosial saat bermedia. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendidikan Pancasila tidak cukup berhenti pada hafalan konseptual, melainkan perlu terhubung dengan dilema etik digital yang nyata. Dalam kaitannya dengan rumusan masalah penelitian, hasil ini secara langsung mendukung dugaan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila berhubungan dengan sikap etis mahasiswa terhadap *deepfake*. Namun, makna pentingnya bukan semata-mata terletak pada signifikansi statistik, melainkan pada penegasan bahwa landasan normatif kebangsaan masih relevan untuk dibaca dalam konteks tantangan media sintesis. Dalam kerangka *civic education* dan *digital citizenship*, temuan ini juga selaras dengan pemikiran Choi (2016; 2017) bahwa kewargan digital tidak hanya

menyangkut kompetensi teknis, tetapi juga menyangkut disposisi, tanggung jawab, dan penilaian normatif ketika individu berpartisipasi dalam ruang publik digital.

Namun, hasil tersebut tidak boleh dibaca secara berlebihan. *Pertama*, desain penelitian ini adalah survei potong lintang korelasional, sehingga tidak memungkinkan penarikan simpulan kausal. *Kedua*, kualitas psikometrik instrumen masih lemah, khususnya pada konstruk sikap etis terhadap *deepfake* yang menunjukkan alpha negatif. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa skor komposit pada konstruk tersebut mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan satu dimensi reflektif yang utuh. Karena itu, asosiasi yang ditemukan lebih tepat dibaca sebagai pola awal yang memerlukan verifikasi melalui instrumen yang lebih kuat. Bahkan ketika korelasi Pearson, Spearman, dan model linear sederhana sama-sama menunjukkan arah hubungan yang positif, konsistensi tersebut harus tetap ditempatkan dalam bingkai eksploratif. Dengan demikian, kekuatan temuan penelitian ini terletak pada kemampuannya membuka indikasi hubungan yang patut ditelusuri lebih lanjut, bukan pada kemampuannya menutup perdebatan tentang bagaimana mekanisme hubungan itu bekerja.

Nilai alpha negatif pada konstruk sikap etis terhadap konten *deepfake* perlu dibahas lebih jauh karena kondisi ini secara teoretis dapat terjadi melalui beberapa kemungkinan mekanisme, tanpa bermaksud memastikan satu penyebab tunggal yang belum diuji secara langsung dalam penelitian ini. *Pertama*, konstruk sikap etis kemungkinan bersifat multidimensi, yaitu memuat beberapa aspek etik yang berbeda, seperti penolakan terhadap penyebaran konten yang merugikan, kepedulian terhadap martabat pihak yang menjadi sasaran *deepfake*, dan kesediaan untuk bertindak secara bertanggung jawab, yang secara konseptual tidak selalu bergerak bersama sebagai satu dimensi tunggal. *Kedua*, butir-butir pada konstruk ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian item belum sepenuhnya merepresentasikan satu dimensi reflektif yang homogen, sehingga korelasi antarbutir menjadi lemah atau bahkan negatif pada pasangan butir tertentu. *Ketiga*, kemungkinan heterogenitas indikator juga dapat muncul apabila beberapa butir mengukur kecenderungan sikap yang berbeda arah secara konseptual, meskipun seluruh item disusun secara *favorable*, sehingga variasi respons antarbutir tidak sepenuhnya konsisten. *Keempat*, secara teoretis dapat terjadi pula bahwa terdapat potensi masalah pada desain item, misalnya rumusan pernyataan yang terlalu umum atau tumpang tindih maknanya dengan konstruk lain, yang menyebabkan butir tidak cukup tajam dalam membedakan variasi sikap etis antar responden. Keempat kemungkinan tersebut belum diuji secara terpisah melalui analisis faktor konfirmatori atau telaah kualitatif terhadap butir, penjelasan ini perlu diposisikan sebagai spekulasi teoretis yang beralasan, bukan sebagai kesimpulan yang telah terverifikasi secara empiris.

Selain itu, rerata seluruh variabel yang sangat tinggi menunjukkan kemungkinan *ceiling effect*, yaitu kecenderungan skor berkumpul pada kategori atas sehingga daya beda antar responden menjadi terbatas. Karena seluruh item juga disusun *favorable*, terdapat kemungkinan *acquiescence bias*, yakni kecenderungan responden untuk menyetujui pernyataan-pernyataan normatif. Dalam konteks topik yang sarat penilaian moral, *social desirability* bias juga mungkin muncul, sehingga jawaban responden mencerminkan apa yang dianggap benar secara sosial, bukan selalu perilaku yang sungguh-sungguh dilakukan. Dengan kata lain, hasil ini lebih merekam orientasi normatif yang dilaporkan sendiri oleh responden daripada perilaku faktual yang telah teruji. Implikasinya, skor yang tinggi pada sikap etis tidak serta-merta berarti bahwa seluruh responden akan menunjukkan kualitas penilaian dan tindakan yang sama ketika berhadapan dengan kasus *deepfake* yang konkret, ambigu, atau menekan secara emosional. Di sinilah pentingnya membedakan antara persetujuan terhadap pernyataan etik di dalam kuesioner dan performa etik-verifikatif dalam situasi digital yang nyata.

Untuk mengurangi *ceiling effect* dan *social desirability bias* tersebut, penelitian mendatang dapat mempertimbangkan beberapa bentuk instrumen yang lebih konkret dibandingkan pernyataan normatif "setuju/tidak setuju". *Pertama*, studi kasus *deepfake* nyata dapat digunakan sebagai stimulus, sehingga responden dihadapkan pada konten spesifik yang perlu mereka nilai dan respons, bukan pada pernyataan abstrak yang mudah disetujui. *Kedua*, *vignette* atau skenario etis yang menggambarkan situasi dilematis terkait *deepfake* dapat membuka variasi jawaban yang lebih luas karena responden dituntut mempertimbangkan konteks, bukan sekadar menyatakan persetujuan terhadap prinsip umum. *Ketiga*, simulasi verifikasi konten, misalnya meminta responden memeriksa kebenaran suatu video atau gambar yang disajikan, dapat mengukur kebiasaan verifikasi secara lebih langsung dibandingkan laporan diri semata. *Keempat*, *performance-based assessment* yang menilai kemampuan responden mengenali atau menindaklanjuti konten *deepfake* secara aktual dapat melengkapi data sikap dengan data perilaku. *Kelima*, *forced-choice items* yang mengharuskan responden memilih di antara beberapa pernyataan dengan daya tarik sosial yang relatif setara dapat mengurangi kecenderungan memilih jawaban yang paling dianggap baik secara sosial. Pendekatan-pendekatan tersebut secara umum dapat meningkatkan daya beda responden karena instrumen tidak lagi semata-mata mengukur kesediaan menyetujui nilai normatif, melainkan mengukur bagaimana nilai tersebut diterjemahkan ke dalam penilaian dan tindakan pada situasi yang lebih konkret, ambigu, dan menyerupai kondisi nyata di media sosial.

Temuan bahwa pemahaman tentang *deepfake* dan perilaku verifikasi informasi juga berkorelasi positif dengan sikap etis menunjukkan bahwa respons mahasiswa terhadap *deepfake* memang tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu variabel. Ahmed et al. (2024) menunjukkan bahwa paparan berulang dapat memperkuat *illusory truth effect* pada *deepfake*, sedangkan Vaccari dan Chadwick (2020) menegaskan bahwa *deepfake* dapat menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan terhadap berita. Sementara itu, Dhahir et al. (2024) dan St-Onge et al. (2024) mengingatkan bahwa kemampuan mengenali *deepfake* tidak selalu identik dengan kemampuan mendeteksi secara akurat dalam situasi nyata. Oleh sebab itu, pendidikan kewargaan digital perlu mengintegrasikan pemahaman nilai, kebiasaan verifikasi, dan kesadaran akan risiko manipulasi media secara bersamaan. Temuan ini juga menarik karena korelasi pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan sikap etis ($r = 0,573$) sedikit lebih kuat daripada korelasi pemahaman tentang *deepfake* dengan sikap etis ($r = 0,535$), sedangkan perilaku verifikasi informasi menunjukkan hubungan yang lebih lemah ($r = 0,308$). Pola tersebut tidak boleh dibaca secara hierarkis atau kausal, tetapi memberi isyarat bahwa dalam sampel ini dimensi normatif tampak memiliki kedekatan yang cukup menonjol dengan sikap etis yang dilaporkan. Pada saat yang sama, hubungan pemahaman nilai-nilai Pancasila dengan perilaku verifikasi informasi yang tidak mencapai signifikansi konvensional memperlihatkan bahwa orientasi nilai belum tentu otomatis termanifestasi menjadi kebiasaan verifikasi yang konsisten. Sehingga, penguatan etika digital di perguruan tinggi tidak cukup hanya menyampaikan nilai, tetapi juga perlu melatih penerjemahan nilai tersebut ke dalam praktik verifikasi yang konkret.

Di sinilah kontribusi artikel ini bagi *civic education* menjadi lebih jelas. Isu *deepfake* dapat dijadikan ruang pembelajaran untuk membentuk disposisi kewargaan digital, yaitu kecenderungan warga untuk bertindak hati-hati, menghormati martabat sesama, tidak reaktif terhadap konten viral, dan bertanggung jawab atas dampak sosial dari tindakannya di ruang digital. Dalam ranah pendidikan Pancasila, penguatan tersebut dapat diterjemahkan melalui pembelajaran berbasis kasus, latihan verifikasi konten, simulasi klarifikasi, dan diskusi etik mengenai privasi, persetujuan, fitnah digital, serta tanggung jawab sosial atas penyebaran konten sintesis. Dari sudut

pandang pendidikan kewarganegaraan, temuan ini mendukung pentingnya menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan kecakapan *civic online reasoning* sebagaimana ditekankan McGrew (2020) serta McGrew dan Breakstone (2023), sehingga mahasiswa tidak hanya mengetahui bahwa suatu tindakan digital itu salah, tetapi juga memiliki kebiasaan menilai sumber, memeriksa klaim, dan mempertimbangkan dampak publik dari keputusan bermediana. Dalam horizon yang lebih luas, pembacaan seperti ini juga sejalan dengan gagasan UNESCO (2021) mengenai pentingnya etika kecerdasan artifisial yang menempatkan martabat manusia, tanggung jawab, dan kehati-hatian sebagai prinsip penting dalam merespons perkembangan teknologi.

Temuan penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai indikasi awal bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila berpotensi menjadi salah satu landasan etik dalam pendidikan kewargaan digital, bukan sebagai bukti final bahwa variabel tersebut secara langsung menyebabkan sikap etis tertentu. Posisi temuan ini berada pada level penguatan argumentasi bahwa persoalan *deepfake* perlu dibaca melalui pertemuan antara pendidikan Pancasila, etika digital, dan kewargaan digital. Kontribusi utamanya bukan pada penyediaan klaim kausal yang final, melainkan pada penunjukan arah bahwa ketika mahasiswa memiliki pemahaman normatif yang lebih kuat, mereka cenderung melaporkan sikap yang lebih etis terhadap konten *deepfake*. Hasil penelitian ini relevan sebagai dasar awal untuk pengembangan kajian lanjutan, penyempurnaan instrumen, dan perancangan pembelajaran yang lebih terukur dalam menjembatani nilai Pancasila dengan praktik kewargaan digital yang bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada sampel 50 mahasiswa, pemahaman nilai-nilai Pancasila berhubungan positif dengan sikap etis terhadap konten *deepfake* di media sosial. Hubungan tersebut tampak pada uji korelasi Pearson maupun Spearman, sementara koefisien positif pada model linear sederhana menguatkan arah asosiasi linear yang sama. Dengan demikian, semakin tinggi pemahaman responden terhadap nilai-nilai Pancasila, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk menunjukkan sikap etis terhadap konten *deepfake*. Meski demikian, temuan ini tidak ditafsirkan sebagai bukti pengaruh kausal.

Implikasi utama penelitian ini ialah bahwa Pendidikan Pancasila, etika digital, dan literasi verifikasi konten sebaiknya dipadukan dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Namun, simpulan ini harus dibaca secara hati-hati karena penelitian memiliki sejumlah keterbatasan, yaitu jumlah responden yang relatif kecil, detail sampling dan persetujuan etik yang belum lengkap, data yang bersifat *self-report* dan potong lintang, seluruh item yang *favorable*, serta kualitas beberapa konstruk instrumen yang belum optimal. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih luas, instrumen yang direvisi dan diuji ulang, serta tugas berbasis skenario atau uji performa agar perbedaan antara orientasi etik dan kemampuan identifikasi *deepfake* dapat diukur secara lebih akurat.

Mengingat temuan bahwa pemahaman normatif yang tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan rutinitas verifikasi yang kuat, beberapa rekomendasi praktis dapat dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta, hasil ini dapat menjadi dasar untuk mengintegrasikan materi etika digital dan studi kasus *deepfake* ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga penguatan nilai tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terhubung dengan praktik verifikasi informasi yang konkret. Bagi program studi, khususnya program studi kependidikan dan teknik, penyelenggaraan pelatihan singkat mengenai verifikasi informasi dan pengenalan konten sintesis dapat dijadikan

bagian dari kegiatan kemahasiswaan atau mata kuliah pendukung, mengingat mahasiswa pada bidang ini kelak akan berperan sebagai pendidik maupun pengembang teknologi. Bagi perguruan tinggi secara umum, penguatan *civic online reasoning* dapat dilakukan melalui analisis kasus *deepfake* aktual dalam forum diskusi lintas mata kuliah, sehingga mahasiswa terlatih menilai sumber, memeriksa klaim, dan mempertimbangkan dampak sosial sebelum menyebarkan konten. Selain itu, pengembangan etika digital berbasis praktik, misalnya melalui simulasi verifikasi atau tugas berbasis skenario, dapat menjadi pelengkap bagi pembelajaran normatif yang sudah berjalan. Rekomendasi-rekomendasi ini bersifat realistis untuk diterapkan dalam skala kelas atau program studi, dan diajukan secara proporsional sesuai dengan temuan penelitian yang masih bersifat eksploratif, tanpa mengklaim sebagai solusi tunggal atas kompleksitas tantangan *deepfake* di lingkungan pendidikan tinggi.

REFERENSI

- Ahmed, S. (2023). Navigating the maze: Deepfakes, cognitive ability, and social media news skepticism. <https://doi.org/10.1177/14614448211019198>
- Ahmed, S., Wei, A., Bee, T., Wei, S., & Ng, T. (2024). Social Media News Use Amplifies the Illusory Truth Effects of Viral Deepfakes: A Cross-National Study of Eight Countries. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 68(5), 778-805. <https://doi.org/10.1080/08838151.2024.2410783>
- Alanazi, S., Asif, S., & Caird, A. (2025). Unmasking deepfakes: a multidisciplinary examination of social impacts and regulatory responses. *Human-Intelligent Systems Integration*, 7(1), 131-153. <https://doi.org/10.1007/s42454-025-00060-4>
- Altuncu, E., Franqueira, V. N., & Li, S. (2024). Deepfake: definitions, performance metrics and standards, datasets, and a meta-review. *Frontiers in Big Data*, 7, 1400024.
- Anggraini, H., Sofyan, F., & Nugraha, Y. (2025). Analisis Pengaruh Aplikasi TikTok terhadap Literasi Digital dan Civic Knowledge Generasi Z. *Journal of Civic Education*, 8(4), 254-263. <https://doi.org/10.24036/jce.v8i4.1106>
- Boediman, E. P. (2025). Exploring the impact of deepfake technology on public trust and media manipulation: A scoping review. *Komunikasi*, 19. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol19.iss2.art8>
- Dhahir, D. F., Kenda, N., Dirgahayu, D., & Djaffar, R. (2024). The Relationship of Digital Literacy, Exposure to AI-Generated Deepfake Videos, and the Ability to Identify Deepfakes in Generation X. <https://doi.org/10.56873/jpkm.v9i2.5873>
- Diel, A., Lalgi, T., Sam, F., Alexander, M., & Alexander, T. (2025). The harm of deepfakes: a scoping review of deepfakes' negative effects on human mind and behavior. *AI & SOCIETY*. <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02774-0>
- Li, W. (2024). "It's Up to Me Whether I Do — Or Don't — Watch Deepfakes": Deepfakes and Behavioral Intention. <https://doi.org/10.1177/21582440241302282>

- Lundberg, E., & Mozelius, P. (2025). The potential effects of deepfakes on news media and entertainment. *AI & SOCIETY*, 40(4), 2159-2170. <https://doi.org/10.1007/s00146-024-02072-1>
- Nagara, M. A. (2025). Deepfake dan distorsi ruang publik digital: Analisis teori public sphere Jurgen Habermas. 03(01), 44-52.
- Nurfauziyanti, F., Bahrudin, F. A., Sultan, U., Tirtayasa, A., & Kebangsaan, W. (2022). Pengaruh literasi digital terhadap perkembangan wawasan kebangsaan. 10(3), 54-66.
- Rejekiingsih, T., Rasyid, M. Al, & Maret, U. S. (2025). Implikasi pengetahuan etika digital terhadap sikap anti-cyberbullying melalui pembelajaran kewarganegaraan digital pada mahasiswa. 36. <https://journal.unnes.ac.id/journals/integralistik>
- St-Onge, J., Harp, R., Lopez, G. S., Rogers, S. P., Haq, I. U., Hebert-Dufresne, L., & Onaolapo, J. (2024). Diverse misinformation: impacts of human biases on detection of deepfakes on networks. <https://doi.org/10.1038/s44260-024-00006-y>
- Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News. <https://doi.org/10.1177/2056305120903408>
- Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the Internet age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565-607. <https://doi.org/10.1080/00933104.2016.1210549>
- Choi, M., Glassman, M., & Cristol, D. (2017). What it means to be a citizen in the Internet age: Development of a reliable and valid digital citizenship scale. *Computers & Education*, 107, 100-112. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.01.002>
- McGrew, S. (2020). Learning to evaluate: An intervention in civic online reasoning. *Computers & Education*, 145, Article 103711. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103711>
- McGrew, S., & Breakstone, J. (2023). Civic online reasoning across the curriculum: Developing and testing the efficacy of digital literacy lessons. *AERA Open*, 9, 1-16. <https://doi.org/10.1177/23328584231176451>
- Pawelec, M. (2022). Deepfakes and democracy (theory): How synthetic audio-visual media for disinformation and hate speech threaten core democratic functions. *Digital Society*, 1, Article 19. <https://doi.org/10.1007/s44206-022-00010-6>
- UNESCO. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence>